

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

1. INSTANSI : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
2. VISI : Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak
3. MISI :
 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan insdustrialisasi;
 3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang;
 4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
 5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.
4. TUJUAN :
 1. Meningkatkan perluasan lapangan kerja;
 2. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 4. Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan;
 5. Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembgaan UMKM dan Koperasi;
 6. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian;
 7. Meningkatkan ketahanan pangan;
 8. Meningkatkan netekspor perdagangan dalam dan luar negeri;
 9. Meingkatkan percepatan kinerja sektor industri;
 10. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata;
 11. Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri serta investasi daerah;

12. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
13. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemeliharaan kelestariannya;
14. Meningkatkan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan;
15. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clen government) serta profesionalisme pelayanan publik;
16. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar-umat beragama;
17. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib;
18. Meningkatkan penguatan kearifan lokal (local wisdom);
19. Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang berkeadilan.

5. TUGAS : a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
b. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
c. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. FUNGSI : a. Membuat regulasi ;
b. Penyelenggara Pemerintahan ;
c. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban ;
d. Mewujudkan kesejahteraan rakyat.

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja	1	Persentase penduduk yang bekerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	BPS	Disnakertransduk Prov Jatim
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	BPS	Disnakertransduk Prov Jatim
2	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	3	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial	$\frac{\sum \text{kasus Perselisihan HI thn } (n) - \text{thn } (n - 1)}{\text{Perkara Perselisihan HI thn } (n - 1)} \times 100\%$	Data perselisihan hubungan industrial Prov. & Kab./Kota.	Disnakertransduk Prov Jatim
3	Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas	4	Angka rata-rata lama sekolah	$\frac{\text{Jumlah lama sekolah seluruh penduduk}}{\text{Jumlah Penduduk Seluruhnya}}$	Dapodik Dispendik	Dinas Pendidikan Prov Jatim
		5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia 7 - 12 th di SD/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 th}} \times 100\%$	Dapodik Dispendik	Dinas Pendidikan Prov Jatim
		6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah Siswa usia 13 - 15 th di SMP/Sederajat}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk Usia 13 - 15 th}} \times 100\%$	Dapodik Dispendik	Dinas Pendidikan Prov Jatim

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia 16 – 18 th di SMA/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 th}} \times 100\%$	Dapodik Dispendik	Dinas Pendidikan Prov Jatim
		8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah Siswa Keseluruhan SD/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 th}} \times 100\%$	Dapodik Dispendik	Dinas Pendidikan Prov Jatim
		9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah Siswa Keseluruhan SMP/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 th}} \times 100\%$	Dapodik Dispendik	Dinas Pendidikan
		10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ Paket C	$\frac{\text{Jumlah Siswa Keseluruhan SMA/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 th}} \times 100\%$	Dapodik Dispendik	Dinas Pendidikan Prov Jatim
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD)	11	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	$\frac{\text{Jumlah Siswa Keseluruhan PAUD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 0 – 6 th}} \times 100\%$	Dapodik Dispendik	Dinas Pendidikan Prov Jatim
5	Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	12	Persentase kualifikasi guru menurut ijazah \geq Sarjana/ Pasca Sarjana	$\frac{\text{Jumlah Guru yg berijazah } \geq \text{ Sarjana/ Pasca Sarjana}}{\text{Jumlah Guru}} \times 100\%$	Dapodik Dispendik	Dinas Pendidikan
6	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	13	Persentase pemuda berprestasi yang dibina	$\frac{\text{Jumlah Pemuda Berprestasi}}{\text{Jumlah Pemuda Terampil dan Mandiri}} \times 100\%$	Laporan Kegiatan	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov Jatim

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		14	Persentase atlet berprestasi yang dibina	$\frac{\text{Jumlah Atlet Berprestasi}}{\text{Jumlah Atlet Pelajar Berbakat}} \times 100$	Laporan Kegiatan	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov Jatim
7	Meningkatnya ketersediaan tenaga medis secara merata	15	Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Medis}}{100.000 \text{ jumlah penduduk}}$	Laporan Program	Dinas Kesehatan Prov Jatim
8	Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan	16	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	<p>Kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental (Pedoman AMP di tingkat Kabupaten/Kota 2014)</p> <p>-----x100.000 KH</p> <p>Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama</p>	Laporan Program	Dinas Kesehatan Prov Jatim

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		17	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	$\frac{\text{Jumlah seluruh kematian bayi (0 – 11 bln) di satu wil. ker. pada kurun waktu ttt}}{\text{Jml kelahiran hidup di wil. ker. pada kurun waktu yang sama}} \times 1.000 \text{ KH}$	Laporan Program	Dinas Kesehatan Prov Jatim
9	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	18	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka Perkiraan lama hidup rata2 penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Laporan Program	Dinas Kesehatan Prov Jatim
10	Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	19	Persentase masyarakat miskin peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat miskin peserta Jamkesda terintegrasi JKN}}{\text{Jumlah masyarakat miskin Jamkesda}} \times 100\%$	Laporan Program	Dinas Kesehatan Prov Jatim
11	Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)	20	Persentase cakupan peserta KB aktif	$\frac{\text{Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu ttt}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$ <p><u>Keterangan :</u> Cakupan Peserta KB Aktif menunjukkan Tingkat Pemanfaatan kontrasepsi di antara para Pasangan Usia Subur (PUS). Program KB di BPPKB adalah pemasangan alat kontrasepsi Pil KB Satu Hormon yaitu untuk Ibu menyusui</p>	Laporan Bidang KB	BPPKB Prov Jatim

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
12	Menurunnya persentase penduduk miskin	21	Persentase penduduk miskin	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk Keseluruhan}} \times 100\%$	BPS	Bapemas Prov Jatim
13	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	22	Persentase penurunan PMKS	$\frac{\sum \text{PMKS thn } (n) - \text{thn } (n - 1)}{\sum \text{PMKS thn } (n - 1)} \times 100\%$	BPS	Dinas Sosial Prov Jatim
14	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	23	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Angka partisipasi keseluruhan di lembaga pemerintah}} \times 100\%$	BPS	BPPKB Prov Jatim
		24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>IPG adalah indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara lain : dimensi harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan, dan tingkat kelayakan hidup. Dimana IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan ketimpangan gender.</p> $1/3 [\text{Xede } (1) + \text{Xede } (2) + \text{linc-dist }]$ <p>Xede(1) = Xede untuk harapan hidup Xede(2) = Xede untuk pendidikan linc-dis = Indeks distribusi pendapatan</p>	BPS	BPPKB Prov Jatim

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		25	Indeks Pemberdayaan Gender	<p>IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> $1/3 (Ipar + IDM + linc-dist)$ <p>Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan linc-dis = Indeks distribusi pendapatan</p>	BPS	BPPKB Prov Jatim
15	Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi	26	Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah kontribusi UKM}}{\text{Total PDRB Jawa Timur}} \times 100\%$	BPS	Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jatim
		27	Prosentase koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Total Koperasi}} \times 100\%$ <p>Kriteria Koperasi Aktif : Koperasi yang melaksanakan RAT Minimal setahun sekali</p>	Laporan data kinerja koperasi se jawa timur	Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jatim
16	Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB)	28	Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	$\frac{\sum \text{Wirausaha Baru } thn (n - 1) - thn (n)}{\sum \text{Wirausaha Baru } thn (n - 1)} \times 100\%$	Laporan data kinerja pertumbuhan WUB	Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jatim

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
17	Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan	28	Rasio perputaran modal Kopwan	Jumlah perputaran modal yang dikucurkan ke anggota kopwan icon $\frac{Omset}{Total Modal}$	Laporan data kinerja koperasi se jawa timur	Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jatim
18	Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan)	30	Pertumbuhan sub-sektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB (%)	$\frac{PDRB \text{ sub - sektor tanaman pangan thn } (n) - thn (n - 1)}{PDRB \text{ sub - sektor tanaman pangan thn } (n - 1)} \times 100\%$	BPS	Dinas Pertanian Prov Jatim
		31	Pertumbuhan sub-sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB (%)	$\frac{PDRB \text{ sub - sektor tanaman perkebunan thn } (n) - thn (n - 1)}{PDRB \text{ sub - sektor tanaman perkebunan thn } (n - 1)} \times 100\%$	BPS	Dinas Perkebunan Prov Jatim
		32	Pertumbuhan sub-sektor peternakan terhadap PDRB (%)	$\frac{PDRB \text{ sub - sektor peternakan thn } (n) - thn (n - 1)}{PDRB \text{ sub - sektor peternakan thn } (n - 1)} \times 100\%$	BPS	Dinas Peternakan Prov Jatim
		33	Pertumbuhan sub-sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	$\frac{PDRB \text{ sub - sektor kehutanan thn } (n) - thn (n - 1)}{PDRB \text{ sub - sektor kehutanan thn } (n - 1)} \times 100\%$	BPS	Dinas Kehutanan Prov Jatim
		34	Pertumbuhan sub-sektor perikanan terhadap PDRB (%)	$\frac{PDRB \text{ sub - sektor perikanan thn } (n) - thn (n - 1)}{PDRB \text{ sub - sektor perikanan thn } (n - 1)} \times 100\%$	BPS	Dinas Perikanan dan Kelautan Prov Jatim

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
19	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (<i>food availability</i>)	35	Ketersediaan pangan (ton) <ul style="list-style-type: none"> - Beras - Jagung - Kedelai - Daging - Telur - Susu - Ikan - Gula 	Jumlah Ketersediaan Pangan (Ton) Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain yang berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk.	Neraca Bahan Makanan (NBM) & Data Ketersediaan Pangan Strategis BKP	Badan Ketahanan Pangan, Prov Jatim
20	Meningkatnya penyerapan pangan (<i>food utilization</i>)	36	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi Skor PPH maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi seimbang dan aman. Skor PPH Ideal = 100. (Permentan 65 Tahun 2010 Tentang SPM).	Laporan Analisis PPH BKP Jatim & Susenas BPS	Badan Ketahanan Pangan Prov Jatim
		37	Tingkat konsumsi beras penduduk Jawa Timur (kg/Kap/Th)	Tingkat konsumsi beras penduduk Jawa Timur (kg/Kap/Th)	Laporan Kajian FSVA	Badan Ketahanan Pangan Prov Jatim
		38	Tingkat keamanan pangan (%)	Tingkat keamanan pangan (%)	Laporan Kajian FSVA	Badan Ketahanan Pangan Prov Jatim

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
21	Meningkatnya akses pangan (food access)	39	Stabilisasi harga beras di tingkat konsumen (coefisien variasi/CV) (%)	$\frac{\text{Standar Deviasi}}{\text{Harga rata - rata}} \times 100\%$ <p>Fluktuasi harga beras ditingkat konsumen berada pada nilai CV < 10%</p> <p>Coefisian Variasi (CV) adalah parameter untuk mengukur fluktuasi harga (naik turunnya) harga dalam kurun waktu tertentu (Bulanan).</p>	Laporan Panel Harga Pangan	Badan Ketahanan Pangan Prov Jatim
22	Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri	40	Pertumbuhan sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	$\frac{(\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun } (n) - (n - 1))}{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun } (n - 1)} \times 100\%$ <p>PDRB : Produk Domestik Regional Bruto ADHK : Atas Dasar Harga Konstan</p>	BPS	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jatim
23	Meningkatnya kontribusi sektor industri	41	Pertumbuhan sub-sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	$\frac{(\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun } (n) - (n - 1))}{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun } (n - 1)} \times 100\%$ <p>PDRB : Produk Domestik Regional Bruto ADHK : Atas Dasar Harga Konstan</p>	BPS	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jatim
24	Meningkatnya kunjungan wisata	42	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Wisatawan mancanegara adalah seluruh wisatawan yang datang dari luar negeri	BPS	Disbudpar Prov Jatim
		43	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Wisatawan mancanegara adalah seluruh wisatawan yang datang dari dalam negeri	BPS	Disbudpar Prov Jatim

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
25	Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal	44	Jumlah fasilitas pertunjukan, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman	Jumlah fasilitas pertunjukan, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman	Laporan Kegiatan	Disbudpar Prov Jatim
		45	Indeks Kepuasan terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur	Nilai Indeks Kepuasan terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Disbudpar Prov Jatim
26	Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah	46	Jumlah minat investasi PMA berdasarkan izin prinsip (trilyun rupiah)	Minat investasi PMA berdasarkan izin prinsip	Project Prospectur BPM	Badan Penanaman Modal Porov Jatim
		47	Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan izin prinsip (trilyun rupiah)	Minat investasi PMDN berdasarkan izin prinsip	Laporan Kinerja Investasi di Jatim	Badan Penanaman Modal Prov Jatim
		48	Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM (trilyun rupiah)	Nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM	Laporan realisasi pelaksanaan izin prinsip	Badan Penanaman Modal Prov Jatim

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		49	Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM (trilyun rupiah)	Nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM	Laporan realisasi pelaksanaan ijin prinsip	Badan Penanaman Modal Prov Jatim
		50	Jumlah nilai realisasi PMDN non fasilitas (trilyun rupiah)	Nilai realisasi PMDN non fasilitas	Laporan realisasi pelaksanaan ijin prinsip	Badan Penanaman Modal Prov Jatim
27	Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara	51	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional (%)	$= \frac{\sum \text{Jalan provinsi kondisi baik + sedang}}{\sum \text{Panjang jalan provinsi}} \times 100\%$ <p>Nilai kondisi jalan diukur dengan menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI (<i>International Roughness Index</i>)) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI (<i>Road Condition Index</i>)). Kondisi baik nilai IRI 0-4, kondisi sedang nilai IRI 4-8; RCI minimum sedang</p>	Hasil survei dan laporan data	Dinas PU Bina Marga Prov Jatim

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		52	<p>Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan (%)</p> $= \frac{\sum \text{Jalan provinsi memenuhi parameter}}{\sum \text{Panjang jalan provinsi}} \times 100\%$ <p>Parameter jalan provinsi yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Spesifikasi penyediaan prasarana Lalu lintas harian rata-rata (smp/hari) Lebar jalur lalu lintas minimum Lebar bahu minimum Tipe perkerasan jalan minimum Kelandaian maksimum Kondisi bangunan pelengkap jalan (jembatan, gorong-gorong, dll) baik dan berfungsi 	Hasil survei dan laporan data	Dinas PU Bina Marga Prov Jatim
		53	<p>Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan</p> $= \frac{\sum \text{Panjang jalan yang terbangun}}{\sum \text{Panjang rencana}} \times 100\%$ <p>Panjang jalan JLS rencana = 673,872 km Panjang Jalan Tembus Lawang Batu = 33,907 km Panjang Jalan Akses PIMPA = 3,300 km Panjang Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun = 64,000 km</p>	Hasil survei dan laporan data	Dinas PU Bina Marga Prov Jatim

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		54	Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan	$= \frac{\sum \text{Panjang jembatan yang terbangun}}{\sum \text{Panjang rencana}} \times 100\%$ <p>Panjang jembatan JLS rencana = 7.742,00 m Panjang Jembatan pada Jalan Tembus Lawang Batu = 385,00 m Panjang Jembatan pada Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun = 45,00 m</p>	Hasil survei dan laporan data	Dinas PU Bina Marga Prov Jatim
		55	Prosentase kabupaten/kota berpredikat Wahana Tata Nugraha	$= \frac{\sum \text{Kab./Kota berpredikat WTN}}{\sum \text{Kab./Kota di Jawa Timur}} \times 100\%$	Data Rekapitulasi Kab/Kota Penerima Wahana Tata Nugraha	Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov Jatim
		56	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang	Nilai Indeks IKM	Data Kinerja Operasional Jembatan Timbang	Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov Jatim

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
28	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	57	Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air bersih (%)	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yg mendapatkan pelayanan Air Bersih}}{\text{Jumlah Rumah Tangga yg membutuhkan Air Bersih}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas PU Cipta Karya Prov Jatim
		58	Persentase KK yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah (%)	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yg mendapatkan pelayanan Air Limbah}}{\text{Jumlah Rumah Tangga yg membutuhkan Pembuangan Air Limbah}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas PU Cipta Karya Prov Jatim
		59	Persentase pelayanan drainase perkotaan (%)	$\frac{\text{Jumlah KK yg terlayani oleh saluran drainase perkotaan}}{\text{Jumlah KK yh membutuhkan saluran drainase}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas PU Cipta Karya Prov Jatim
		60	Persentase capaian layanan persampahan perkotaan (%)	$\frac{\text{Volume sampah RT yg dapat ditampung di TPA}}{\text{Volume sampah RT}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas PU Cipta Karya Prov Jatim
		61	Persentase rusun terbangun	$\frac{\text{Jumlah KK golongan MBR yg memiliki rumah}}{\text{Jumlah KK golongan MBR}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas PU Cipta Karya Prov Jatim
29	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	62	Luas areal layanan irigasi (ha)	Luas tanam musim Tanam I + II + III pada areal pertanian beririgasi teknis	Laporan Tahunan	Dinas PU Pengairan Prov Jatim

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		63	Rasio/ kinerja jaringan irigasi	$= \left(\frac{\text{Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jaringan irigasi total}} \right) \times 100 \%$	Laporan Tahunan	Dinas PU Pengairan Prov Jatim
		64	Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku	$= \left(\frac{\text{Volume ketersediaan air baku}}{\text{Volume kebutuhan air baku}} \right) \times 100 \%$	Laporan Tahunan	Dinas PU Pengairan
		65	Persentase Penurunan luas genangan banjir	$= \left(\frac{(\text{Luas genangan tahun lalu } (N - 1)) - \text{Luas genangan tahun ini } (N)}{\text{Luas genangan tahun lalu } (N - 1)} \right) \times 100 \%$	Laporan Tahunan	Dinas PU Pengairan Prov Jatim
30	Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi	66	Rasio ketersediaan listrik	$\frac{\text{Ketersediaan Listrik}}{\text{Kebutuhan Listrik}}$	Hasil Survey	Dinas ESDM Prov Jatim
		67	Persentase rumah tangga pengguna listrik	$\frac{\text{RT pengguna Listrik}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	Hasil Survey	Dinas ESDM Prov Jatim
31	Meningkatnya kawasan hutan yang dikonservasi	68	Luas konservasi kawasan hutan (ha)	Luas kawasan hutan yang dikonservasi per tahun <u>Keterangan :</u> Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap	Laporan Tahunan	Dinas Kehutanan Prov Jatim

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
32	Meningkatnya sumber mata air terkonservasi	69	Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi	Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi	Dok. Lap. SLHD BLH Prov. Jatim	Badan Lingkungan Hidup Prov Jatim
33	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir serta laut	70	Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air	$\frac{\text{Jumlah titik pantau peningkatan kualitas air}}{\text{Jumlah Titik Pantau}} \times 100\%$	Dok. Lap. BLH Prov. Jatim	Badan Lingkungan Hidup Prov Jatim
34	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	71	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (juta ton eq CO ₂)	<p>Perhitungannya mengacu kepada IPCC Guidline 2006 untuk negara-negara Asia.</p> <p><u>Keterangan :</u></p> <p>Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah naiknya konsentrasi gas <u>karbon dioksida</u> (CO₂) dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO₂ ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran <u>bahan bakar minyak</u>, <u>batu bara</u> dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya.</p>	Dok. Lap. SLHD BLH Prov. Jatim	Badan Lingkungan Hidup Prov Jatim

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
35	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	72	Prosentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun	$\frac{\text{Jumlah kawasan strategis provinsi yg telah dikendalikan}}{\text{Jumlah kawasan strategis provinsi}} \times 100\%$	Perhitungan Pemanfaatan Dana APBN dan APBD Provinsi Jaim Dinas	Dinas PU Cipta Karya Prov jatim
		73	Jumlah rencana rinci tata ruang Kabupaten/ Kota	Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota		Dinas PU Cipta Karya Prov Jatim
		74	Prosentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	$\frac{\text{Jumlah RTR Perkotaan Kab./Kota yg telah dievaluasi}}{\text{Jumlah RTR Perkotaan Kab./Kota}} \times 100\%$	Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas PU Cipta Karya Prov Jatim
		75	Prosentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang	$\frac{\text{Jumlah kasus pemanfaatan ruang yang berhasil dimediasi}}{\text{Jumlah kasus pemanfaatan ruang}} \times 100\%$		Dinas PU Cipta Karya Prov Jatim
36	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	76	Jumlah SKPD provinsi yang melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Jumlah SKPD provinsi yang melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Laporan Tahunan	Inspektorat Prov Jatim

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
37	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	77	Hasil EKPPD	Hasil EKPPD	Hasil Evaluasi	Inspektorat, Biro Adm Pemerintahan Umum Prov Jatim
38	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan	78	Penilaian SAKIP	Penilaian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun berjalan	Biro Organisasi, Inspektorat dan Bappeda Prov Jatim
39	Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	79	Jumlah raperda inisiatif dewan	Jumlah raperda inisiatif dewan	Laporan Tahunan	Sekretariat DPRD Prov Jatim
40	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	80	Opini BPK	Opini BPK	Hasil Evaluasi BPK	Inspektorat dan BPKAD Prov Jatim

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
41	Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	81	Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan	Standarisasi Pengelolaan Arsip sesuai Pergub No. 26/2009 tentang Pengelolaan Tata Kearsipan	Hasil Evaluasi	Badan Arsip dan Perpustakaan Prov Jatim
42	Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	82	Tertangani korban bencana secara cepat dan tepat sasaran (%)	$\frac{\text{Jumlah korban bencana tertangani}}{\text{Jumlah korban bencana}} \times 100\%$	Surat Rekomendasi Rencana Pemulihan Pasca Bencana	BPBD Prov Jatim
43	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	83	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah tempat ibadah}}{\text{Jumlah penduduk}}$	BPS	Biro Adm Kemasyarakatan Prov Jatim
44	Meningkatnya komunikasi antar-umat beragama	84	Persentase kerusuhan bermotif SARA yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah kerusuhan bermotif SARA tertangani}}{\text{Jumlah kerusuhan bermotif SARA}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Bakesbang Prov Jatim

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
45	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman dan tertib	85	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat}}{\text{Jumlah Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat}} \times 100\%$	Dokumen Tibumtranmas	Satpol PP Prov Jatim
46	Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial	86	Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan}}{\text{Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya}} \times 100\%$	Dokumen di	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Jatim
47	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM	87	Persentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kejadian terkait HAM}} \times 100\%$	Laporan Pemantauan Perkembangan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Prov Jatim

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
48	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum	88	Jumlah ormas/ LSM yang terdaftar	Jumlah ormas/ LSM yang terdaftar di Pemerintah	Rekapitulasi Data Ormas/LSM Prov Jatim	Badan Kesatuan Bangsa Prov Jatim

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN II